



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

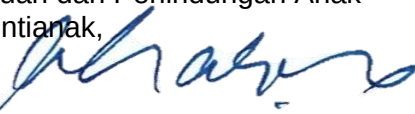
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024 disusun.

Renja Tahun Anggaran 2024 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang Kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, serta mitra terkait di luar sektor Instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program DP2KBP3A termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini hingga selesai.

Pontianak, Juli 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pontianak,



Drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640114 198812 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika	6
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat ...	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	71
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2024	71
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024	74
BAB IV PENDANAAN PD.....	106
BAB IV PENUTUP	119

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak disusun berdasarkan Kota Pontianak, Renstra DP2KBP3A Kota Pontianak, serta berpedoman pada Renja dan Lembaga terkait urusan yang diemban oleh (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Renstra (DP2KBP3A) Kota Pontianak 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kota Pontianak yang berpedoman pada RPJMD 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kota Pontianak serta sejalan dengan Tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan".

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
30. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun lalu (tahun 2022).

Renja 2022 merupakan tahun kedua dari periode RPJM 2020 – 2024, yang sudah menggunakan indikator dan nomenklatur yang telah dimutakhirkan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019. Untuk itu, capaian renja pada tahun 2022 akan memiliki persamaan nomenklatur dan sebagian indikator kinerjanya dengan usulan Renja 2024, dikarenakan Renja pada periode 2022 dan 2023 telah mengikuti perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

Review pada Renja n-2 (2022) melihat pada capaian kinerja outcome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 dan kemudian diperbaharui melalui perjanjian kinerja perubahan tahun 2022, capain indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel dibawah :

Untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Triwulan IV Tahun 2022 Kota Pontianak**

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 Persen	95 persen	100 persen	100 persen	100%	95 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lapor an perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	96 Dokumen/La poran	24 Dokum en	24 Dokum en	24 Dokum en	100%	24 Dokumen/La poran		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	56 Dokumen	14 Dokum en	14 Dokum en	14 Dokum en	100%	14 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	24 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggara an administrasi keuangan perangkat daerah	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	30 orang		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 dokumen		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	3 dokumen		
	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepengawasann ya	124 ASN	30 ASN	30 ASN	30 ASN	100%	32 ASN		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny a	260 stel	60 stel	93 stel	93 stel	100%	1 Paket		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	8 ASN	2 ASN	2 ASN	0 ASN	0%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggara an administrasi umum perangkat daerah	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	20 paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	400 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	20 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	400 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	50 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	24 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen		

Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1600 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	1 laporan		
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	4 laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55 unit	8 unit	10 unit	10 unit	100%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	55 unit	8	8 unit	10 unit	125%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	488 unit		122 unit	122 unit	100%	140 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	228 unit	57 unit	57 unit	57 unit	100%	54 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	260 unit	65 unit	65 unit	65 unit	100%	60 unit		

Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Mento r Kategori	Mad ya Katego ri	Prata ma Katego ri	Mad ya katego ri	100%	Mad ya kategori		
	Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,56 Persen	35,0 7 Persen	11,12 persen	39,1 6 persen	352%	12,1 7 persen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	240 Program		60 Progra m	60 Progra m	100%	1 dokumen		
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 lembaga	20 lembag a	20 lembag a	0	0%	30 OPD		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	0%		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3200 peserta	800 peserta	800 peserta	800 peserta	100%	0%		
	Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembang an	100 Persen		100 persen	100 persen	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 orang		50 orang	50 orang	100%	0%		
	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0031 rasio	8,92 rasio	0,0038 rasio	7,73 rasio	203421%	0,0036 persen		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen		

Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	26 kegiatan	3	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	1 dokumen		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	12 lembaga		3 lembaga	3 lembaga	100%	35 persen		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 dokumen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kot a									
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0 orang		50 orang	50 orang	100%	0%		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100 persen		75 persen	100 persen	133%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	0%		
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2 data	2 data	2 data	2 data	100%	0%		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 persen	1 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen		
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah , dan Dunia Usaha	100 persen		30,0 persen	30 persen	100%	50 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	80 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	40 organisasi		
	Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembang an	45 persen		20 persen	20 persen	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0 media massa		20 Media Massa	20 Media Massa	100%	0%		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	jumlah Fasilitator Forum Anak yang mendapatkan orientasi dan peningkatan kapasitas	36 orang		25 orang	25 orang	100%	0%		
	PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	259 kasus	64 kasus	76 kasus	82 kasus	108%	80 orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani	259 kasus	62 kasus	150 kasus	82 kasus	55%	80 layanan		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembang an	45 persen	 persen	20 persen	20 persen	100%	30 pesen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	terlaksananya kegiatan dan dukungan manajemen BOPPA	3 kegiatan		3 kegiata n	3 kegiata n	100%	1 dokumen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah FAD yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	36 FAD		36 FAD	36 FAD	100%	0%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	90 persen	55 persen	60 persen	60 persen	100%	60 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	persentase lembaga kemasyarakata n yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	90 persen	55 persen	60 persen	60 persen	100%	75 persen		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	4 kelurahan	1	1 kelurah an	1 kelurah an	100%	36 lembaga		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Masyarakat Hukum Adat									
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	120 peserta		30 peserta	30 peserta	100%	0%		
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi tim penggerak PKK	36 kelompok	- -	36 kelompok	36 kelompok	100%	1 dokumen		
	PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,1 Persen		2,4 persen	0 persen	0%	2,21 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	325 kelahiran		549 kelahir an	0 kelahir an	0%	400 kelahiran		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100 Persen		100 persen	100 persen	100%	90 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah stakeholders/pe mangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	46 Stakholder		46 Stakhol der	0 Stakhol der	0%	0%		
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kot a	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan	1 perda		1 perda	1 perda	100%	1 dokumen		
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang dimutakhirkan	1 data	1	1 data	0 data	0%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen		80 persen	80 persen	100%	100 persen		
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	6 rumah data		2 rumah data	2 rumah data	100%	1 dokumen		
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1 data	1	1 data	1 data	100%	0%		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30 data	30	30 data	30 data	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,72 Persen	Persen	70,48 persen	70,5 7 persen	100%	70,5 2 persen		
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,40 Persen	Persen	8 persen	0 persen	0%	8 persen		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 persen		100 persen	100 persen	100%	100 persen		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1 Pokja	1 Pokja	1 Pokja	1 Pokja	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan manajemen KIE dalam promosi program Bangga Kencana	3 jenis KIE		3 jenis KIE	3 jenis KIE	100%	1 dokumen		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	12 kali		4 kali	4 kali	100%	1 dokumen		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	192 kegiatan	48 kegiata n	48 kegiata n	48 kegiata n	100%	2 laporan		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	6 Balai Penyuluhan	5 Balai Penyulu han	5 Balai Penyulu han	5 Balai Penyulu han	100%	4 laporan		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian Program KKBPk	Tersedianya laporan audit kasus stunting ditingkat kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	4 laporan		
	Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna	100 pesen	100 pesen	100 persen	100 persen	100%	0%		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional	0 kader		116 kader	116 kader	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat- Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat- Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	95 faskes	95 faskes	95 faskes	95 faskes	100%	4 laporan		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	5502 akseptor	akseptor	1834 akseptor	985 akseptor	54%	706 orang		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	34 paket	4 paket	9 paket	9 paket	100%	9 paket		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	260 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	100%	1 laporan		
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	0 peserta	 peserta	93 peserta	93 peserta	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakata n yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	organi sasi ormas	ormas	15 ormas	0 ormas	0%	15 organisasi		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	8 kegiatan	kegiata n	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	7 kampung KB		
	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21 persen	persen	19,00 % persen	0 persen	0%	20,9 persen		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,55 Persen	Persen	60,12 persen	0 persen	0%	62,4 4 persen		
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	24 paket	2 paket	22 paket	22 paket	100%	10 unit		
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	200 peserta	50 peserta	50 peserta	50 peserta	100%	0%		

Ko de	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingk at Realis asi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	12 bulan	bulan	12 bulan	12 bulan	100%	270 orang		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	0%		

Berikut dijabarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2022, adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung yaitu :

- a. Program Pengendalian Penduduk;
Ada 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 90% karena ada efisiensi dalam realisasi makan minum kegiatan.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
Ada 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan yang capaian realisasi dibawah 80% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB. karena ada beberapa belanja yang tidak dapat diserap antara lain; distribusi alkon biaya pembelian bahan bakar tidak dapat diserap dikarenakan distribusi alkon menggunakan kendaraan dinas dan sewa dari pihak ke tiga, belanja jasa pelayanan KB MKJP tidak dapat diserap dikarenakan tidak memenuhi target akseptor yang telah ditetapkan BKKBN Pusat sebanyak 1834 akseptor hanya terealisasi 985 akseptor.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
Ada 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 90% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB, realisasi sebesar 28,31% dikarenakan biaya operasional pendampingan Ibu Hamil, Calon Pengantin, Keluarga Beresiko Stunting dan dukungan biaya pulsa bagi surveilen TPK pendataan keluarga beresiko stunting tidak terserap.
- d. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
Terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%
- e. Program Perlindungan Perempuan;
Ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.
- f. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
Ada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi diatas 90%.
- g. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

- Ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan,realisasi 100%,
- h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
Ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, trealisasi di atas sebesar 80%
 - i. Program Perlindungan Khusus Anak;
Terdapat 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, 3 sub kegiatan realisasi dibawah 80%, dikarenakan sumber pendanaan dari DAK Non Fisik, peruntukan belanja sudah ditetapkan oleh kementerian, sehingga daerah tidak bisa melakukan pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap, belanja yang tidak dapat diserap yaitu belanja mediko legal, pemeriksaan untuk korban hidup dan meninggal (autopsi), bidang PPPA sudah menindaklanjuti melalui PKS dengan RS bhayangkara dan kepolisian, namun pihak kepolisian juga memiliki anggaran untuk Mediko legal, belanja lainnya yang tidak dapat diserap yaitu belanja tenaga ahli untuk kasus persidangan, dan biaya penjangkauan korban diluar kota tidak dapat diserap karena bergantung pada ada tidaknya kasus tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari table 2.2 dibawah dapat terlihat bahwa kinerja pelayanan PD tergambar pada 12 indikator, sebagian besar indikator sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

TFR (Angka Kelahiran Total) indikator ini tercapai melebihi target yang ditentukan. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

1. Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15 - 49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya
2. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2020, capaian PD 70,40% telah melampaui target nasional sebesar 65%.
3. Unmet need *atau* kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi pada tahun 2022 capaian PD sebesar 12,70%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%. Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penjangkaran akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencanangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi masyarakat miskin.
4. Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Capaian PD pada tahun 2022 adalah sebesar 25%.
5. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
6. Angka stunting pada baduta (balita dua tahun) di Kota Pontianak sebesar 14,7. Presiden RI mengamanatkan angka stunting harus di bawah 14 persen jadi memang masih ada sedikit tantangan kita, tetapi angka ini sudah berada pada standar stunting WHO yakni di bawah 20 persen.

7. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan adalah untuk mengukur seberapa besar keterlibatan LPM yang ada dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Pontianak, khususnya di Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Pada tahun 2022 seluruh LPM yang terdaftar di masing – masing kecamatan dan kelurahan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan di kelurahan dan kecamatan
8. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Capaian PD pada tahun 2020 adalah APE kategori Pratama. Untuk mewujudkan capaian kategori yang lebih tinggi strategi yang dilakukan PD adalah memasukkan Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak, meningkatkan Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil, menuangkan Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
9. Rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 sebesar 0,0073. Langkah kedepan untuk menurunkan rasio kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pencegahan dan pelayanan. Pencegahan meliputi pembentukan kader pencegahan KDRT mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan, pembentukan forum puspa, melaksanakan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan keterampilan perempuan. Sedangkan untuk pelayanan, PD memaksimalkan pelayanan di rumah aman untuk menampung perempuan korban kekerasan,

memberikan bantuan hukum dan psikolog dan pelayanan pendampingan ke tengah kesehatan dan hukum bagi korban yang membutuhkan.

10. Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data gender dan anak pada tahun 2022 tercapai 100%. Banyak data sekunder yang dibutuhkan PD untuk updating data gender dan anak, oleh karena itu pelibatan stackholder terkait yang memiliki data menjadi penting untuk pemenuhan data terkait.
11. Forum anak daerah menjadi salah satu tolak ukur suatu daerah dalam pemenuhan Hak –Hak Anak, pada tahun 2022 seluruh kecamatan dan kelurahan telah terbentuk Forum Anak Daerah, dan semua FAD aktif dalam semua kegiatan terkait pembangunan hak – hak anak di daerah.
12. Pada tahun 2022 sebesar 87 kasus anak terdampingi, peningkatan jumlah kasus diakibatkan banyak pengungkapan kasus prostitusi anak yang diungkap oleh pihak kepolisian pada tahun 2022.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP2KBP3A
Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,17	2,39	2,21	2,19	2,1	1.87%	1,74	2,06	2,19	2,1	
2	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			546	549	400	350	325	549	397	110	350	325	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			70,23%	70,48%	70,52%	70,61%	70,72%	70.40%	70,50	69,88	70,61%	70,72%	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			12,14%	12,47%	8%	7,70%	7,40%	11.93%	11,13	12,70	7,70%	7,40%	
5	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			0%	19%	20,9%	21,0%	21,0%	25,00%	22,35	22,35	21,0%	21,0%	

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa faktor yang menyebabkan belum semua target-target indikator kinerja sasaran strategis (*outcome*) dan target kinerja kegiatan (*output*) yang direncanakan dapat direalisasikan belum optimal disebabkan oleh beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang baik dan memadai sehingga data dan informasi yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan tidak tercapai secara optimal.
- b. Kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sehingga pelayanan prima belum menjangkau dan memberikan kepuasan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik di internal Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun antar SKPD terkait serta dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan lagi secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efisien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi swadaya secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Lemahnya kekuatan modal sosial (social capital) seperti kepercayaan, kebersamaan, partisipasi, jejaring masyarakat yang menyebabkan terhambatnya pengembangan potensi masyarakat, kurangnya kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan rendahnya posisi tawar

masyarakat, dan tidak efektifnya berbagai program dan kegiatan yang direncanakan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengupayakan berbagai langkah kebijakan yaitu :

- a. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja seperti Kecamatan, Kelurahan, SKPD, BKKBN, Kepolisian, TNI serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, Pekerja Sosial, Pihak Swasta, PKK, LPM, BKM, dan lainnya.
- b. Membangun sistem perencanaan kinerja yang lebih terarah dan difahami oleh semua pemangku program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga pada saatnya pelaksanaan dan pelaporan atas terlaksananya program dan kegiatan dapat disampaikan secara akurat dan akuntabel.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Perluasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui berbagai kebijakan dan strategi yang bersifat terpadu dan terkoordinas dengan berbagai stakeholder;
- e. Pembenahan internal organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel rancangan awal RKPD 2024 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Pontianak

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pontianak

RANCANGAN AWAL RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.646.508.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.246.508.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.646.508.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.246.508.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.570.534.550	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.770.534.550	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 persen	6.122.054.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 persen	6.272.054.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	69.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	69.300.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.300.000	

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	11.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4.934.354.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4.934.354.000	

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.692.354.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.692.354.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	10.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	54.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	54.600.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	24.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	24.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	272.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	362.200.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	41.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	101.800.000	tambahan untuk operasional balai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	10.100.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	40.100.000	tambahan untuk alat kebersihan balai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	24.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	24.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	29.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	29.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	150.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	45.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	45.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	439.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	439.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	407.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	407.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	297.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	357.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	238.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	238.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	59.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	119.600.000	tambahan untuk pemeliharaan balai
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,56 Persen	107.987.550	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,56 Persen	157.987.550	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)	100 persen	60.110.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)	100 persen	110.110.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	70.000.000	Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Evaluasi PPRG dan ARG
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	40.110.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	40.110.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga	100 persen	47.877.550	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga	100 persen	47.877.550	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	32.877.550	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	32.877.550	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	15.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,3 Persentase	257.700.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,3 Persentase	257.700.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	100 persen	109.700.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	100 persen	109.700.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.700.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.700.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 persen	148.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 persen	148.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	113.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	113.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100 Persentase	35.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100 Persentase	35.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100 persen	35.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100 persen	35.000.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	35.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	35.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 Persentase	188.693.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 Persentase	188.693.000	

RANCANGAN AWAL RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100 persen	137.866.200	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100 persen	137.866.200	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	137.866.200	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	137.866.200	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	85 persen	50.826.800	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	85 persen	50.826.800	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	50.826.800	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	50.826.800	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100 persen	859.100.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100 persen	859.100.000	

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	85 persen	10.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	85 persen	10.000.000	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35 Orang	10.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35 Orang	10.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	100 persen	774.504.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	100 persen	774.504.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250 Orang	520.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250 Orang	520.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Pontianak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	250 Orang	254.504.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Pontianak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	250 Orang	254.504.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	95 persen	74.596.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	95 persen	74.596.000	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Pontianak	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 Orang	74.596.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Pontianak	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 Orang	74.596.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.559.491.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.809.491.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen	200.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen	250.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100 persen	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100 persen	250.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	250.000.000	Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Profil Desa/Kelurahan)

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	65 Persentase	1.359.491.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	65 Persentase	1.559.491.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	50 persen	1.359.491.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	50 persen	1.559.491.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	4.745.500	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	54.745.500	fasilitasi dan bimtek kegiatan lembaga kemasyarakatan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	250.000.000	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Unit	4.745.500	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pontianak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Unit	104.745.500	untuk bantuan sarana dan prasaran lembaga kemasyarakatan
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	100.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.200.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.516.482.450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.666.482.450	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	245.180.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	245.180.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	3 kelompok	100.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	3 kelompok	100.000.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	45.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	45.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	145.180.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	145.180.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	100.200.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	100.200.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kota Pontianak	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	25.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kota Pontianak	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	25.000.000	
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	19.980.000	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	19.980.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,5 Persen 70,75 Persentase	4.283.842.450	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,5 Persen 70,75 Persentase	4.283.842.450	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 Persen	821.100.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 Persen	821.100.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	317.700.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	317.700.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	198.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	198.000.000	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	150.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Pontianak	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	75.400.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Pontianak	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	75.400.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100 persen	3.100.242.450	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100 persen	3.100.242.450	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	43.200.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	43.200.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706 Orang	330.714.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706 Orang	330.714.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	2.489.291.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	2.489.291.000	

RANCANGAN AWAL RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	71.100.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	71.100.000	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	165.937.450	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	165.937.450	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 persen	362.500.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 persen	362.500.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Pontianak	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	362.500.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Pontianak	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	362.500.000	

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	61 Indeks (skala 0-100) 22,1 Tahun	987.460.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	61 Indeks (skala 0-100) 22,1 Tahun	1.137.460.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100 persen 90 Persen	987.460.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100 persen 90 Persen	1.137.460.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit	360.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit	360.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	54.160.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	204.160.000	Generasi Berencana (Genre)

RANCANGAN AWAL RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	270 Orang	573.300.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Pontianak	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	270 Orang	573.300.000	
					14.646.508.000					15.396.508.000	-750.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat diutarakan secara langsung secara bottom up mulai dari kelurahan sampai kecamatan menggunakan sistem SIPD yang telah berjalan di Pemerintahan Kota Pontianak. Berikut beberapa usulan program kegiatan yang tertampung pada DP2KBP3A Kota Pontianak :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2024 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1.1 Angka Stunting Balita	14	13	12
		a. Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	a.1 Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	90	92	95
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		2.1 Laju pertumbuhan Penduduk	1,64	1,62	1,60
		a. Menurunnya Angka Kelahiran Total	a.1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,37	2,22	2,10
		b. Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	b.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,8	8,8	7,8
3	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak		3.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,20	94,25	94,33
			3.2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama
		a. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a.1 Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Mentor
		b. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	b.1 Rasio anak korban kekerasan	0,05	0,04	0,02
4	Menurunnya Kemiskinan		4.1 Tingkat Kemiskinan	4,25 - 4,30	4,20 - 4,25	4,10 - 4,20
		a. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	a.1 Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	78,25	80,00	85,00

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mengemban 4 sasaran Kota Pontianak yang menjadi Tujuan OPD, dengan 5 Indikator Kinerja Tujuan OPD/Sasaran Kota Pontianak. Selanjutnya pencapaian 4 Tujuan tersebut juga didukung dengan pencapaian 6 Sasaran dan 6 Indikator Sasaran sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Tujuan “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

Stunting adalah masalah kurang gizi kroni yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, berisiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya produktifitas perekonomian seorang individu.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kota Pontianak tahun 2022 tercatat 19,7 % sementara target nasional pada tahun 2024 diharapkan angka stunting turun pada posisi 14%. Dukungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dengan Sasaran Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK dengan Indikator Sasaran Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan.

2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan indikator tujuan “Laju pertumbuhan Penduduk”.

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Berdasarkan buku Pontianak Dalam Angka Tahun 2023, Penduduk yang mendiami wilayah Kota Pontianak terus bertambah dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP 2020-2022) 0,96%. Sebenarnya angka tersebut sudah cukup baik jika dibandingkan dengan target Nasional di angka 1,11%, namun capaian tersebut tetap harus dijaga mengingat Kota

Pontianak adalah Ibu Kota Provinsi dengan karakteristik tersebut pertumbuhan penduduk dari faktor migrasi menjadi faktor yang dominan.

Menjaga pencapaian tersebut dengan didukung oleh 2 sasaran yaitu;

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
- b. Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi dengan indikator sasaran Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

3. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Indikator Tujuan “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak” dan “Tingkat Capaian Kota Layak Anak”.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living).

Kabupaten/Kota yang mempunyai **sistem** pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk mendukung pencapaian tersebut dengan didukung oleh 2 sasaran yaitu;

- a. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- b. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Rasio anak korban kekerasan

4. Menurunnya Kemiskinan dengan Indikator Tujuan “Tingkat Kemiskinan”

Dukungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dengan Sasaran Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan dengan indikator sasaran “Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan”.

Memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Dengan langkah tersebut diatas diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dapat mendukung pencapaian Penurunan Angka Kemiskinan.

3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diimplementasikan sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024 yang selaras dengan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 3) Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

- 4) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
- 5) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 2) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 3) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 4) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 5) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - 6) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 5) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - 6) Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 5) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

- BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 6) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
4. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 5) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 6) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 7) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

10. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DP2KBP3A Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pontianak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.646.508.000,00				15.378.833.400
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.646.508.000,00				15.378.833.400
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.570.534.550,00				7.949.061.278
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 persen	6.122.054.000,00			95 persen	6.428.156.700
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	69.300.000,00			100 persen	72.765.000
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	20.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	21.315.000
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11.550.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11.550.000
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	16.800.000
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	11.550.000
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	4.934.354.000,00			100 persen	5.181.071.700
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	4.692.354.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		33 Orang/bulan	4.926.971.700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	210.000.000
2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	21.000.000
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	11.550.000
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	11.550.000
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 persen	10.000.000,00			100 persen	10.500.000
2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	5.250.000
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.250.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	54.600.000,00			100 persen	57.330.000
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	24.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	25.830.000
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Orang	15.750.000
2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	15.750.000
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	272.200.000,00			100 persen	285.810.000
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	5.880.000
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18 Paket	41.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Paket	43.890.000
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8 Paket	10.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Paket	10.605.000
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		16 Paket	24.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Paket	25.725.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		32 Paket	29.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Paket	30.975.000
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		36 Dokumen	5.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	5.985.000
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	157.500.000
2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	5.250.000
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	45.000.000,00			100 persen	47.250.000
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	47.250.000
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	439.000.000,00			100 persen	460.950.000
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6.300.000
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	26.775.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	407.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	427.875.000
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	297.600.000,00			100 persen	312.480.000
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		51 Unit	238.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 Unit	249.900.000
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	59.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Unit	62.580.000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		13,56 Persen	107.987.550,00			13,56 Persen	113.386.928
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)		100 persen	60.110.000,00			100 persen	63.115.500

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	21.000.000
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Perangkat Daerah	40.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Perangkat Daerah	42.115.500
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga		100 persen	47.877.550,00			100 persen	50.271.428
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		20 Orang	32.877.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	34.521.428

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.750.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		7,3 Persentase	257.700.000,00			7,3 Persentase	270.585.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan		100 persen	109.700.000,00			100 persen	115.185.000
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	109.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Dokumen	115.185.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		100 persen	148.000.000,00			100 persen	155.400.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		30 Orang	113.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	118.650.000
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	36.750.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak		100 Persentase	35.000.000,00			100 Persentase	36.750.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update		100 persen	35.000.000,00			100 persen	36.750.000
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	36.750.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100 Persentase	188.693.000,00			100 Persentase	198.127.650
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha		100 persen	137.866.200,00			100 persen	144.759.510
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		30 Organisasi	137.866.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Organisasi	144.759.510
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga		85 persen	50.826.800,00			85 persen	53.368.140
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang	50.826.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Orang	53.368.140

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan		100 persen	859.100.000,00			100 persen	902.055.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak		85 persen	10.000.000,00			85 persen	10.500.000
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		35 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	10.500.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi		100 persen	774.504.000,00			100 persen	813.229.200
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		250 Orang	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Orang	546.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		250 Orang	254.504.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		250 Orang	267.229.200
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga		95 persen	74.596.000,00			95 persen	78.325.800
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		2 Orang	74.596.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Orang	78.325.800
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.559.491.000,00				1.637.465.550
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100 persen	200.000.000,00			100 persen	210.000.000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan		100 persen	200.000.000,00			100 persen	210.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		2 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	210.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan		65 Persentase	1.359.491.000,00			65 Persentase	1.427.465.550
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota		50 persen	1.359.491.000,00			50 persen	1.427.465.550

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	4.745.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4.982.775
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		36 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Lembaga	52.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		36 Unit	4.745.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Unit	4.982.775
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		2 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	105.000.000
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.260.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.516.482.450,00				5.792.306.573
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	245.180.000,00			18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	257.439.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		3 kelompok	100.000.000,00			3 kelompok	105.000.000
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	57.750.000
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Kegiatan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Kegiatan	47.250.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	145.180.000,00			100 persen	152.439.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		4 Dokumen	100.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Dokumen	105.210.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		1 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	26.250.000
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 Dokumen	19.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20.979.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		71,5 Persen 70,75 Persentase	4.283.842.450,00			71,5 Persen 70,75 Persentase	4.498.034.573
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		100 Persen	821.100.000,00			100 Persen	862.155.000
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Laporan	84.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Laporan	317.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Laporan	333.585.000
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		4 Laporan	198.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Laporan	207.900.000
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		3 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Dokumen	157.500.000
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		2 Dokumen	75.400.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	79.170.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan		100 persen	3.100.242.450,00			100 persen	3.255.254.573
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		4 Laporan	43.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4 Laporan	45.360.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		706 Orang	330.714.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		706 Orang	347.249.700
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		5 Unit	2.489.291.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	2.613.755.550

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		2 Laporan	71.100.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Laporan	74.655.000
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		90 Orang	165.937.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Orang	174.234.323
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100 persen	362.500.000,00			100 persen	380.625.000
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		10 Kampung	362.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Kampung	380.625.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		61 Indeks (skala 0-100) 22,1 Tahun	987.460.000,00			61 Indeks (skala 0-100) 22,1 Tahun	1.036.833.000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting		100 persen 90 Persen	987.460.000,00			100 persen 90 Persen	1.036.833.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		5 Unit	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Unit	378.000.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		50 Orang	54.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	56.868.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		270 Orang	573.300.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		270 Orang	601.965.000
TOTAL									14.646.508.000,00				15.378.833.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam kurun waktu tahun 2024.

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024 yang terdiri dari 11 (sebelas) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 14.646.508.000,-. Dengan demikian ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RANCANGAN RENJA DP2KBP3A 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			14.646.508.000,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.646.508.000,00			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.570.534.550,00			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 persen	6.122.054.000,00		
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 persen	69.300.000,00		
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	20.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	4.934.354.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	4.692.354.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
2	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		2 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 persen	10.000.000,00		
2	0	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	54.600.000,00		
2	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	24.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 persen	272.200.000,00		
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18 Paket	41.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8 Paket	10.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		16 Paket	24.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		32 Paket	29.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		36 Dokumen	5.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	45.000.000,00		
2	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	439.000.000,00		
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	407.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	297.600.000,00		
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		51 Unit	238.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	59.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		13,56 Persen	107.987.550,00		
2	0	0	2.0		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pgrg) dan anggaran responsif gender (ARG)		100 persen	60.110.000,00		
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Perangkat Daerah	40.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga		100 persen	47.877.550,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		20 Orang	32.877.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		7,3 Persentase	257.700.000,00		
2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan		100 persen	109.700.000,00		
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	109.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan		100 persen	148.000.000,00		
2	0	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		30 Orang	113.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak		100 Persentase	35.000.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update		100 persen	35.000.000,00		
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif		100 Persentase	188.693.000,00		
2	0	0	2.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha		100 persen	137.866.200,00		
2	0	0	2.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		30 Organisasi	137.866.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga		85 persen	50.826.800,00		
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		250 Orang	50.826.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan		100 persen	859.100.000,00		
2	0	0	2.0		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak		85 persen	10.000.000,00		
2	0	0	2.0	000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		35 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	0	0	2.0		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi		100 persen	774.504.000,00		
2	0	0	2.0	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		250 Orang	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	0	0	2.0	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		250 Orang	254.504.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	0	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga		95 persen	74.596.000,00		
2	0	0	2.0	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		2 Orang	74.596.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.559.491.000,00		
2	1	0			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100 persen	200.000.000,00		
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan		100 persen	200.000.000,00		
2	1	0	2.0	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		2 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan		65 Persentase	1.359.491.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	1	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota		50 persen	1.359.491.000,00		
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	4.745.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		36 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		36 Unit	4.745.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		2 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.516.482.450,00		
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		18 Kelahiran/1000 WUS 15-19	245.180.000,00		
2	1	0	2.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		3 kelompok	100.000.000,00		
2	1	0	2.0	000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	002	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Kegiatan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	145.180.000,00		
2	1	0	2.0	001	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		4 Dokumen	100.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	001	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		1 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	002	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 Dokumen	19.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		71,5 Persen 70,75 Persentase	4.283.842.450,00		
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		100 Persen	821.100.000,00		
2	1	0	2.0	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		4 Laporan	317.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		4 Laporan	198.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		3 Dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		2 Dokumen	75.400.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	1	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan		100 persen	3.100.242.450,00		
2	1	0	2.0	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		4 Laporan	43.200.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		706 Orang	330.714.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		5 Unit	2.489.291.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
2	1	0	2.0	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		2 Laporan	71.100.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		90 Orang	165.937.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100 persen	362.500.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
								Outcome Program/Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		10 Kampung	362.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		61 Indeks (skala 0-100) 22,1 Tahun	987.460.000,00		
2	1	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting		100 persen 90 Persen	987.460.000,00		
2	1	0	2.0	001	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		5 Unit	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
2	1	0	2.0	001	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		50 Orang	54.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	0	2.0	002	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		270 Orang	573.300.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
TOTAL									14.646.508.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pontianak, Agustus 2023
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pontianak


drg. Multi Juto Bhatarendro, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640114 198812 1 002